KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pelayanan Publik Bisa Terganggu
Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tenaga Honorer Dihapus

Pelayanan Publik Bisa Terganggu

WAKIL Ketua DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah memberi penjelasan tentang nasib para pegawai honorer. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di instansi pemerintahan pada 2023.

"Jumlah tenaga honorer di instansi Pemerintah tidak sedikit. Banyak dari mereka yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai, kebijakan ini menimbulkan masalah baru, yakni tidak tertanganinya pelayanan publik," ujar Gus Muhaimin-sapaan Abdul Muhaimin Iskandar, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo akan menghapus tenaga honorer. Menurut dia, status tenaga honorer di pemerintahan tidak ada lagi pada 2 tahun mendatang, sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Terkait tenaga honorer, melalui Peraturan Pemerintah (PP), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan 2023. Status pegawai pemerintah di 2023 hanya ada dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kedua status tersebut disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Tjahjo.

Beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo mengatakan, 1 itu akan dipenuhi melalui tenaga alih daya lewat pihak ketiga atau *outsourcing*.

"Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat *basic*, seperti *cleaning service*, sekuriti dan lainnya itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji (*payroll*)," jelasnya.

Melanjutkan keterangannya, Gus Muhaimin mengatakan, Pemerintah harus memiliki dan memberi solusi efektif sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Salah satunya, melalui pengangkatan honorer menjadi PNS. Namun, hal itu harus diperluas, karena rekrutmen PPPK yang dibuka Pemerintah masih fokus pada posisi tertentu, seperti guru atau tenaga kesehatan.

"Saya mendorong Kemenpan RB meminta seluruh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mendata kebutuhan tenaga PPPK di instansi masing-masing. Dengan begitu, dapat dibuka pengajuan untuk rekrutmen PPPK di instansi tersebut, mengakomodir pengangkatan tenaga honorer," pinta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Gus Muhaimin menambahkan, Pemerintah harus memprioritaskan tenaga honorer yang telah lama mengabdi, diberi kesempatan lebih besar dan dipermudah untuk mengikuti seleksi PPPK.

Sebab, rekrutmen guru PPPK yang dilaksanakan sebelumnya, justru banyak terisi oleh guru swasta karena guru honorer di sekolah negeri tidak lulus seleksi PPPK.

"Kita harus menghargai mereka yang sudah lama memberi pengabdian untuk bangsa ini. Jangan sampai diabaikan," tandasnya. ■ ONI